



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Samsul Afif Rahula

7111413081

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian pada:

Hari : Kamis

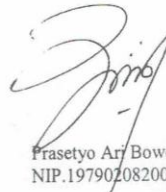
Tanggal : 12 Maret 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Pafurida, S.E., M.Sc
NIP.198502162008122004

Pembimbing



Prasetyo Ar Bowo, S.E., M.Si
NIP.197902082006041002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2020

Penguji I



Fafurida, S.E., M.Sc
NIP. 198502162008122004

Penguji II



Karsinah, S.E., M. Si
NIP. 197010142009122001

Penguji III



Prasetyo Ari Bowo, S.E., M. Si
NIP. 197902082006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto MBA, PhD
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsul Afif Rahula

NIM : 7111413081

Tempat, tanggal, lahir : Magelang, 18 Agustus 1995

Alamat : Dusun Jurang Rt 001/Rw 002, Desa Kalisalak, Kecamatan
Salaman, Kabupaten Magelang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dalam skripsi ini, tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai karya saya. Pemikiran atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti jika skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 02 Maret 2020



Samsul Afif Rahula
NIM 7111413081

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

Saat-saat paling berharga dalam hidup bukan hanya hari-hari yang disebut kesuksesan, namun juga hari-hari ketika kita keluar dari kesedihan dan keputusasaan. Bangkit dari keterpurukan, menemukan semangat untuk hidup dan janji pencapaian di masa depan (Flaubert Gustave).

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ibu (Alm. Siti Farkhiyah) dan Ayah (Alm. Agus Jati S) yang selalu mendoakan dan membimbing hingga akhir hayatnya.
2. Kakak (Nuzatul Dyah S) dan adik (Handini Ratna A) yang tercinta dan selalu menemani.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang tak pernah putus memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan karya akhir berupa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan sejauh ini tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa yang senantiasa datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Drs. Heri Yanto MBA, PhD., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Fafurida, S.E.,M.Sc, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Program Strata I (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang juga selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Karsinah, S.E.,M.Si, Selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prasetyo Ari Bowo, S.E.,M.Si, Dosen Pembimbing yang telah tulus dan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan, nasihat, semangat kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang tak pernah sungkan membagikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu serta kakak dan adik atas segala cinta dan kasih sayang yang tak pernah habis, perjuangannya yang tak pernah lelah, dukungannya yang tak terbatas, serta doanya yang tidak sekalipun padam demi kesuksesan penulis.
8. Teman-teman K-15 dan Sedulur Deve, teman-teman Ekonomi Pembangunan B 2013, atas segala keceriaan yang pernah dirasakan bersama penulis
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Akhir kata, dalam skripsi ini tentu masih banyak celah yang harus dikoreksi dan diberikan masukan. Untuk itu, penulis membuka tangan selebar-lebarnya atas kritik, saran, masukan, dan tanggapan dari penulisan skripsi ini.

Semarang, 12 Maret 2020



Samsul Afif Rahula
NIM 7111413081

SARI

Rahula, Samsul Afif. 2020. “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prasetyo Ari Bowo, S.E.,M.Si

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan pelimpahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing. Dampak dari kebijakan tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintahnya masing-masing yang secara tidak langsung menuntut daerah untuk mandiri. Tingkat kemandirian Jawa Tengah yang diukur dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 18,2% menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa dalam kurun waktu tahun 2015-2018. Kemandirian yang rendah di Jawa Tengah sejalan dengan ketergantungannya terhadap transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum sebesar 40%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dana alokasi umum dan pendapatan daerah terhadap belanja daerah.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan tahun 2016-2018 diambil dengan metode total sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai $F_{hitung} (1270.886) > F_{tabel} (3.09)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti bahwa secara simultan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada tiap variabel yang berarti bahwa secara parsial dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Simpulan dari penelitian ini adalah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah baik secara simultan atau parsial berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh dana alokasi umum yang lebih besar dari pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga tujuan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai.

ABSTRACT

Rahula, Samsul Afif. 2020. "The Effect of General Allocation Fund and Local Own-source Revenue on Regency/City Regional Government Spending in Central Java Province". Final Project. Department of Development Economics Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor: Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si.

Keywords: General Allocation Fund, Regional Original Revenue, Regional Expenditures

The implementation of regional autonomy is the delegation of various authorities from the central government to regional governments to carry out their respective governments. The impact of this policy is that regions have the authority and responsibility to meet the needs and interests of their respective governments which indirectly require regions to be independent. The level of independence of Central Java, measured from the ratio of local own-source revenue to total regional income of 18.2%, is the lowest when compared to other regions in Java in the period of 2015-2018. Low independence in Central Java is in line with its dependence on transfers from the central government, especially the general allocation fund of 40%. The purpose of this research is to determine the simultaneous and partial influence of general allocation funds and local own-source revenue on regional expenditure.

The population and sample in this research were all reports on the realization of the City and Regency budgets in Central Java, which amounted to 35 Regencies / Cities with an observation period of 2016-2018 taken with the total sampling method. Data collection methods in this research are the documentation and analysis techniques used are multiple linear regression.

The results of this research indicate the value of $F_{\text{count}} (1270,886) > F_{\text{table}} (3.09)$ with a significance value of 0,000, which means that simultaneous general allocation funds and local own-source revenue have a positive and significant effect on regional expenditure. Based on the results of the t test showed that $T_{\text{count}} > T_{\text{table}}$ with a significance value of 0.000 on each variable, which means that partially the general allocation fund and local own-source revenue had a positive and significant effect on regional spending. The conclusion of this research is the general allocation fund and local own-source revenue, either simultaneously or partially influencing regional expenditure.

The influence of general allocation funds that is greater than local own-source revenue in meeting regional expenditure needs is expected to increase local government awareness to further optimize the potential of local own-source revenue to reduce dependence on the central government so that the goal of regional independence in implementing regional autonomy can be achieved.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Perumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Kegunaan Penelitian.....	15
1.6.1 Kegunaan Teoritis	15
1.6.2 Kegunaan Praktis	15
1.7 Orisinalitas Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory).....	17
2.1.1 Keuangan Daerah	17
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18
2.2. Kajian Variabel Penelitian	20
2.2.1 Belanja Daerah	20
2.2.1.1 Pengertian Belanja Daerah.....	20
2.2.1.2 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010.....	21
2.2.1.3 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005.....	24
2.2.2 Dana Alokasi Umum.....	26
2.2.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum.....	26
2.2.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum	27
2.2.2.3 Penetapan Dana Alokasi Umum	29
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah	31
2.2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	31
2.2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	33
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	38
2.4. Kerangka Berpikir.....	42
2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah.....	42
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	43

2.5. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	45
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	45
3.2.1 Populasi Penelitian	45
3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	46
3.3 Operasional Variabel Penelitian	46
3.4 Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	49
3.4.1 Jenis Data	49
3.4.2 Sumber Data	49
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
3.5.1 Teknik Pengolahan Data	50
3.5.2 Teknik Analisis Data	50
3.5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	51
3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik	52
3.5.2.3 Analisis Regresi Berganda	54
3.5.2.4 Uji Hipotesis	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	59
4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif	59
4.1.2 Hasil Analisis Data	60
4.1.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.1.2.2 Hasil Analisis Linear Berganda	66
4.1.2.3 Hasil Uji Hipotesis	67
4.2 Pembahasan	71
4.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah	72
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	74
4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	77
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Belanja Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia (triliun).....	4
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (miliar rupiah).....	4
Tabel 1.3 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2018.....	8
Tabel 1.4 Rasio Jumlah PAD, DAU, DAK, Bagi Hasil, dan Pendapatan Lainnya Terhadap Jumlah Total Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	10
Tabel 1.5 Perbandingan Proporsi Jumlah PAD dan DAU terhadap Jumlah Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.4 Kriteria Nilai Uji Durbin-Watson	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokolerasi	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F.....	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik T (t-test).....	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2015-2018 (triliun rupiah)	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas Data	61
Gambar 4.2 P-P Plot Hasil Uji Normalitas Data.....	62
Gambar 4.3 Hasil Scatterplot	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data.....	88
Lampiran 2 Hasil Distribusi Statistik.....	92
Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	92
Lampiran 4 Hasil Regresi Linear Berganda.....	95
Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan yang paling baru adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengaturan berbagai proses politik di daerahnya masing-masing. Dengan diberikannya kewenangan, hak dan kewajiban seluas-luasnya kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berupa pelimpahan kewenangan keuangan. Kewenangan keuangan yang diberikan kepada daerah adalah untuk mengelola keuangannya masing-masing dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Kemudian dalam melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan berupa dana atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola dalam melaksanakan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Dampak dari kebijakan tersebut adalah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan pemerintahnya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan implikasi dari kebijakan otonomi daerah secara tidak langsung menuntut daerah untuk mandiri. Dengan memiliki sifat kemandirian diharapkan suatu daerah dapat lebih

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan membantu daerah fokus dalam mengembangkan potensi daerah yang ada.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nuarisa (2013) bahwasannya diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sumarmi (2010) bahwasanya kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah NKRI, yang dikukuhkan dengan Undang-Undang telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah.

Pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 23 Tahun 2014). Sebagaimana dikemukakan oleh Vanesha (2019) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan dan gambaran kemampuan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya dan membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran adalah adanya keterbatasan sumber daya. Dengan sumberdaya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus bisa mengalokasikan sumberdaya yang diperoleh untuk membiayai kebutuhan belanja daerah secara optimal. Menurut Kawedar sebagaimana yang dikutip oleh Nuarisa (2013) pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 1.1
Struktur Belanja Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia (triliun)

Uraian		Provinsi			
		2017		2018	
		Rp	%	Rp	%
Total Belanja		329,1	100%	349,6	100%
1	Belanja Pegawai	87,1	25,5%	90,6	25,9%
2	Belanja Barang dan Jasa	68,4	20,8%	78,8	22,5%
3	Belanja Modal	55,4	16,8%	59,4	17%
4	Belanja Lainnya	118,3	35,9%	120,9	34,6%

Sumber: DJPK, Ringkasan APBD, 2018

Informasi berdasarkan tabel 1.1 diperoleh bahwa pada tahun 2018 dalam skala Provinsi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 6,2% dari tahun 2017. Pertumbuhan belanja daerah mengindikasikan bahwa kebutuhan daerah yang meningkat dan Pemerintah Daerah yang berupaya untuk memenuhinya. Tidak berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang berupaya untuk meningkatkan realisasi belanja daerahnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tabel 1.2 berikut disajikan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2018.

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (miliar rupiah)

Tahun	Jumlah Belanja Daerah
2012	11.446.844
2013	12.724.776
2014	15.086.065
2015	17.820.761
2016	19.354.371
2017	22.884.713
2018	24.478.633

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

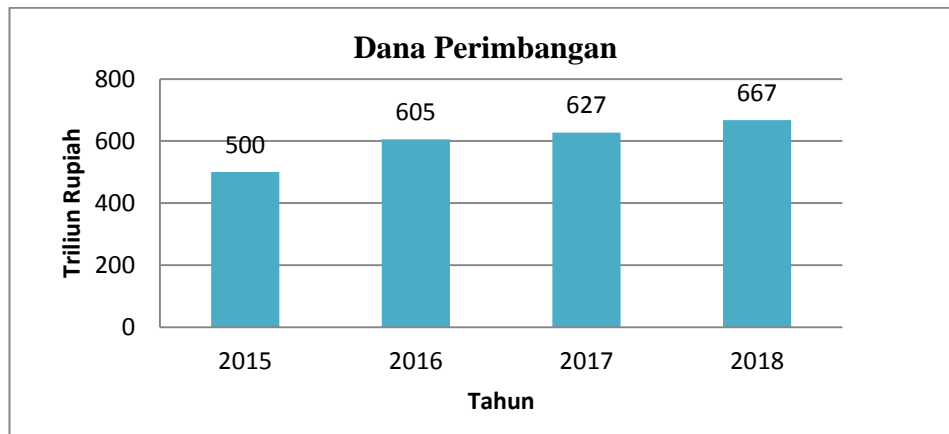
Data berdasarkan tabel 1.2 diperoleh informasi bahwa belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan selama periode 2012-2018. Dengan selalu bertambahnya kebutuhan di Provinsi Jawa Tengah maka harus diimbangi dengan peningkatan alat pemenuh kebutuhannya.

Belanja daerah dalam pembiayaannya tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana kepada Pemerintah Daerah. Salah satu Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian DAU ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut.

Data pengelolaan keuangan daerah oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2018 memberikan informasi bahwa keterganungan APBD terhadap Transfer ke Daerah mencapai 79,84% diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan Kab. Bolaang Mongondow Timur sebagai Kabupaten yang

memiliki ketergantungan tertinggi sebesar 97,12% dan Kab. Bandung sebagai Kabupaten dengan ketergantungan terendah yaitu sebesar 10,61%.



Gambar 1.1 Jumlah Dana Perimbangan Provinsi Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2015-2018 (triliun rupiah)

Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Grafik di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari tahun 2015 sampai 2018, dana perimbangan selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 dana perimbangan Provinsi, Kabupaten dan Kota mengalami kenaikan paling tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp105 triliun, kemudian pada tahun 2018 dana perimbangan menyumbang porsi terbesar yaitu Rp667 triliun atau 61% dari komposisi pendapatan.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada bagaimana cara pandang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Dana Alokasi Umum itu sendiri. Bagi Pemerinta Pusat, DAU dijadikan instrumen *horizontal imbalance* dalam rangka pemerataan atau mengisi *fiscal gap* yang terjadi. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, DAU dimaksudkan utnuk membantu kekurangan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerahnya. Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Wulansari (2015) yang menyatakan bahwa permasalahan yang

terjadi saat ini adalah Pemerintah Daerah terlalu menggantungkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah yang telah dilakukan oleh Untung pada tahun 2017 diperoleh hasil bahwa DAU baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Barat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ferdiansyah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah namun variabel lain yang digunakan berupa Dana Perimbangan tidak menunjukkan pengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati dan Vidya pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah di DIY dan Jawa Tengah. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi (Budiarti 2013).

Sumber penerimaan daerah lainnya yang dapat digunakan dalam membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur melalui besarnya target PAD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran (Saptaningsih 2009). Pendapatan Asli Daerah juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam

mengelola keuangan daerahnya, semakin tinggi rasio PAD dibanding dengan total pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah (Kusnandar et all 2009).

Informasi yang diperoleh dari laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018, Pulau Jawa menjadi wilayah paling tinggi dalam memenuhi kebutuhannya sendiri melalui PAD sebesar 36,1% diikuti oleh Pulau Bali-Nusa Tenggara sebesar 25,1%, Pulau Sumatera 18,9%, Pulau Kalimantan 18,3%, Pulau Sulawesi 15,3% dan Pulau Papua-Maluku sebesar 6%. Dengan demikian Pulau Jawa dapat dikatakan sebagai pulau paling mandiri jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hakim (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwasanya secara umum dalam mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.

Tabel 1.3
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2018

Prov\Tahun	2015	2016	2017	2018
Banten	32,5%	32,6%	31,1%	42,1%
DKI Jakarta	76,2%	68,6%	66,4%	67,5%
Jawa Barat	22,2%	22,9%	25,1%	34,1%
Jawa Tengah	15,5%	16,3%	15,1%	25,8%
Jawa Timur	18,9%	19,2%	18,5%	26,6%
DI Yogyakarta	22,5%	22,9%	21,5%	28,5%

Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2018 memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah paling rendah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Jawa Tengah masih rendah, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2018 Jawa Tengah memiliki rata-rata sebesar 18,2%. Rata-rata tersebut merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain, di Provinsi Banten memiliki rata-rata 35,6%, Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata 69,7%, Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata 26,1%, Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata 20,8%, Provinsi DI Yogyakarta memiliki rata-rata 23,8% dan secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2018 memiliki rata-rata sebesar 32,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membiayai kegiatan pemerintahan di Jawa Tengah masih sangat bergantung dari transfer dana Pemerintah Pusat atau jika dibandingkan dengan povinsi lainnya di Pulau Jawa, tingkat kemandirian Jawa Tengah masih dibawah rata-rata bahkan menempati posisi paling rendah.

Pendapat yang dikemukakan oleh Prakosa (2004) menyatakan bahwasanya transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerinah Daerah merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah, oleh karena itu tujuan dari transfer yang dimaksud adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah serta menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik diseluruh daerah. Sidi *et all* (2002) dan BPPK Departemen Keuangan (2004) juga mengemukakan bahwa salah satu tujuan pemberian transfer yaitu pemerataan horizontal.

Tabel 1.4
Rasio Jumlah PAD, DAU, DAK, Bagi Hasil, dan Pendapatan Lainnya
Terhadap Jumlah Total Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa
Tengah Tahun 2015-2018

Tahun	PAD	DAU	DAK	Bagi Hasil	Pend.Lain
2015	15,27%	49,34%	4,74%	2,26%	28,36%
2016	16,34%	49,32%	13,67%	2,76%	17,89%
2017	19,42%	44,84%	13,41%	2,45%	19,85%
2018	16,48%	45,48%	14,76%	2,56%	20,69%
Rata-rata	16,88%	47,24%	11,64%	2,51%	21,70%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Data berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2018 Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki sumbangan tertinggi dengan rata-rata sebesar 47,24% terhadap pendapatan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Kondisi tersebut sesuai dengan fenomena umum yang dihadapi sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia dimana peranan / kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih rendah dan masih mendominasinya penerimaan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Halim (2009) bahwasannya permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa ada indikasi kurang optimalnya daerah dalam menggali potensi sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Dominannya peran dana transfer dibandingkan PAD dalam membiayai

belanja daerah juga tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintah terhadap aliran transfer itu sendiri.

Tabel 1.5
Perbandingan Rasio Jumlah PAD dan DAU Terhadap Jumlah Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2018

Tahun	Kabupaten		Kota	
	PAD	DAU	PAD	DAU
2015	11,71%	43,91%	22,49%	34,74%
2016	10,68%	46,72%	23,52%	39,11%
2017	15,73%	41,52%	29,22%	34,28%
2018	13,27%	43,85%	28,44%	34,55%
Rata-rata	12,85%	44,00%	25,92%	35,67%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Perbandingan pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten berkontribusi sebesar 12,58% dalam jumlah belanja Kabupaten sedangkan pada wilayah Kota berkontribusi sebesar 25,92%. Jika dibandingkan dengan kontribusi dana alokasi umum, kontribusi PAD masih terbilang rendah. Nilai rata-rata kontribusi DAU Kabupaten sebesar 44,00% dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah sedangkan kontribusi DAU dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah Kota lebih kecil yaitu sebesar 35,67%. Dapat disimpulkan bahwa setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerahnya masih didominasi oleh DAU dari Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa pada tahun 2004 tentang analisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian penelitian oleh Priambudi mendapatkan hasil yang

serupa bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2013.

Permasalahan yang telah dijelaskan dan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, serta kesenjangan hasil beberapa penelitian terdahulu mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut. Selain itu dapat diketahui bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah serta kecenderungan Pemerintah Daerah untuk bergantung pada DAU daripada PAD-nya. Dengan berlatar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan pada periode tahun 2012-2018. Pada tahun 2018 dalam skala Provinsi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 6,2% dari tahun 2017.
2. Pada tahun anggaran 2015 sampai 2018, dana perimbangan selalu mengalami kenaikan.
3. Pulau Jawa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri melalui PAD menempati peringkat teratas dengan rata-rata PAD sebesar 36,1%. Sedangkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat paling bawah, dalam kurun waktu 2015-2018 rata-rata hanya memiliki kontribusi sebesar 18,2%.

4. Nilai rata-rata kontribusi DAU Kabupaten sebesar 44,00% dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah sedangkan kontribusi DAU dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah Kota lebih kecil yaitu sebesar 35,67%. Sehingga kontribusi PAD lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi DAU.

1.3. Batasan Masalah

Keterbatasan kemampuan penulis dan agar penulis lebih terarah, maka permasalahan ini akan difokuskan hanya pada hal-hal yang dapat mempengaruhi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun pada penelitian ini lebih memfokuskan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah saja.

1.4. Perumusan Masalah

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah memiliki harapan agar setiap daerah mampu menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing serta mendorong kemandirian keuangan tiap daerah. Perbedaan kemampuan PAD setiap daerah dalam membiayai belanjanya mengakibatkan terjadinya kesenjangan keuangan antar daerah yang kemudian mengharuskan Pemerintah Pusat untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

Transfer dana yang diberikan Pemerintah Pusat tidak hanya menjadi alat untuk menutup celah fiskal daerah. Dominannya peran dana transfer berupa DAU yang diberikan berakibat pada ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana

transfer itu sendiri atau dapat artikan semakin besar DAU yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.6. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis untuk semua pihak:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan bisa memberikan sumbangan yang memperkaya kajian teori serta dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam rangka pengembangan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, belanja daerah, pendapatan asli daerah maupun dana alokasi umum.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Pemerintah terkait, sebagai salah satu alternatif pertimbangan atau pandangan pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan untuk Pemerintah Daerah agar memanfaatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu berupa dana alokasi umum secara proposional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, informasi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk bahan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Vanesha,dkk (2019) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Ferdiansyah (2018) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, Muktiawan (2016) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap alokasi belanja daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota di Pulau Jawa), Nuarisa (2013) Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Awaniz (2011) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan, Kurniawati (2010) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi variabel bebas, variabel terikat, periode pengamatan dan objek penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah secara keseluruhan. Sehingga dapat memperkuat, melengkapi dan menyempurnakan penelitian terdahulu. Objek penelitian ini adalah lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Periode pengamatan dalam penelitian ini pada tahun 2016-2018 sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory)

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Abdul Halim (2007:24) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memiliki suatu rencana yang matang untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah dibebankan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada dasarnya APBD merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012:103) APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. APBD juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja. Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian dijelaskan bahwa APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Belanja Daerah

2.2.1.1 Pengertian Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diperoleh informasi bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dapat diperoleh informasi bahwa belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2 sebagaimana yang dikutip oleh Erlina (2008) adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah, dari tahun ke

tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Sembiring (2010) menjelaskan bahwa makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.1.2 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan terdiri dari

klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Berikut diuraikan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi.

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masingmasing kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang
- 3) Subsidi
- 4) Hibah
- 5) Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 6) Belanja Aset Lainnya

c. Belanja Lain-lain/ Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota serta dana bagi hasil dari Kabupaten/Kota ke desa.

2. Kalsifikasi Organisasi

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/ barang. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah (Sekda) pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

Kota, dinas pemerintah tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan lembaga teknis daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

3. Klasifikasi Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

2.2.1.3 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- 1) Pelayanan umum
 - 2) Ketertiban dan keamanan
 - 3) Ekonomi
 - 4) Lingkungan hidup
 - 5) Perumahan dan fasilitas umum
 - 6) Kesehatan
 - 7) Pariwisata dan budaya
 - 8) Pendidikan
 - 9) Perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
- a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang, dibagi atas:
 - 1) Belanja pengadaan barang dan jasa
 - 2) Belanja pemeliharaan
 - 3) Belanja perjalanan
 - c. Belanja modal
 - d. Bunga
 - e. Subsidi
 - f. Hibah

- g. Bantuan sosial
- h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- i. Belanja tidak terduga

2.2.2 Dana Alokasi Umum

2.2.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005, kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Dana lokasi umum ditetapkan 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.
2. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan sebesar 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara Nasional.
3. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan

alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan Fiskal (kbF) dengan kapasitas Fiskal (KpF),

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan, selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi, akan disalurkan dengan pemindahbukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pendapat di atas adalah DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) dengan mengacu PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa tujuan

DAU terutama adalah untuk: (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Pratiwi (2007) mengemukakan beberapa tujuan diberikannya dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*).
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*).
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa tujuan pemberian DAU untuk mendistribusi pendapatan secara adil antar wilayah, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan keberterimaan dan menjadi kepentingan daerah kecukupan, seperti mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam

rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.2.2.3 Penetapan Dana Alokasi Umum

Pasal 48 PP No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pasal 37 juga disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri neto.

DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Dana ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah. Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan:

1. Potensi daerah (PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan SDA).
2. Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah.
3. Tersedianya dana APBN.

Pendapat yang dikemukakan oleh Halim (2009) yang menyatakan bahwa caramenghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (2001) menjelaskan bahwa perhitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu:

a. Faktor murni

Faktor murni adalah perhitungan DAU berdasarkan formula. Untuk menghindari efek negatif, misalnya kesenjangan antar daerah, maka digunakan faktor penyeimbang.

b. Faktor penyeimbang

Faktor penyeimbang merupakan suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran daerah.

Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan DAU mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar satu persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan

menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26 persen.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diperoleh informasi bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Mardiasmo (2004) memberikan definisi PAD sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat

membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Halim (2011) memberikan definisi PAD sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian PAD di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

2.2.3.2 Sumber-sumber PAD

Pasal 22 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan bahwa, pendapatan asli daerah terdiri atas sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan informasi bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang- undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Djaenuri (2012) mengemukakan bahwa pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Bersifat pajak bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak kendaraan di atas air
5. Pajak air dibawah tanah
6. Pajak air permukaan

Pada umumnya jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

7. Pajak parkir

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan.

Djaenuri (2012) mengungkapkan jenis-jenis retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atas retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Adanya otonomi daerah memfasilitasi daerah untuk mengelola kekayaannya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-Undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini bersama

sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, dimaksudkan sebagai salah satu bahan masukan bagi peneliti agar dapat melengkapi antara penelitian satu dengan penelitian lain. Adapun pokok bahasan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Komponen	Keterangan
1	Judul	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
	Penulis	Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi, Parmadi (2019)
	Analisis Data	Model regresi data panel
	Hasil	Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
	Perbedaan	Pada penelitian ini variabel independen hanya menggunakan PAD dan DAU. Kemudian penelitian ini meninjau belanja daerah secara keseluruhan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Venny, dkk hanya terhadap belanja modal.
2	Judul	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah
	Penulis	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa (2018)
	Analisis Data	Analisis regresi linear berganda
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
	Perbedaan	Pada penelitian yang dilakukan Irfan, dkk menggunakan variabel independen dana perimbangan sedangkan pada penelitian ini tidak. Selain itu, obyek penelitian yang digunakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sedangkan penelitian ini di Provinsi Jawa Tengah.
3	Judul	Pengaruh pendapatan asli daerah , dana alokasi umum, dana alokasi khusus, terhadap belanja daerah dan dana bagi hasil sebagai pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Priode tahun 20102014
	Penulis	Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017)
	Analisis Data	Model regresi data panel
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja

		Daerah. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian dengan metode analisis regresi moderasi (MRA) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil bukan variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan PAD, DAU, DAK dengan Belanja Daerah.
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Joko, dkk menggunakan variabel dana bagi hasil sebagai variabel pemoderasi sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel pemoderasi.
4	Judul	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap alokasi belanja daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota di Pulau Jawa)
	Penulis	Muktiawan (2016)
	Analisis Data	Analisis regresi linear berganda
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah. Sedangkan Luas wilayah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah.
	Perbedaan	Obyek penelitian yang digunakan oleh Muktiawan yakni pemerintah Kota di Pulau Jawa sedangkan pada penelitian ini hanya di lingkup Jawa Tengah.
5	Judul	Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
	Penulis	Sheila Ardhian Nuarisa (2013)
	Analisis Data	Analisis regresi berganda
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
	Perbedaan	Penelitian ini meninjau belanja daerah secara keseluruhan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sheila hanya terhadap belanja modal.
6	Judul	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa
	Penulis	Ari Mulianta Ginting (2012)
	Analisis Data	Model regresi panel data
	Hasil	Pengaruh pertumbuhan DAU positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan belanja total daerah Provinsi di pulau Jawa, sedangkan pertumbuhan PAD tidak signifikan mempengaruhi belanja daerah Provinsi di Pulau Jawa. Lebih lanjut kajian ini juga mendapatkan hasil bahwa terjadi <i>flypaper effect</i> pada pengaruh DAU

		dan PAD terhadap belanja daerah Provinsi di Pulau Jawa. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan DAU dan PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja pegawai dan belanja modal.
	Perbedaan	Obyek penelitian yang digunakan oleh Ari yakni pemerintah Kota di Pulau Jawa sedangkan pada penelitian ini hanya di lingkup Jawa Tengah.
7	Judul	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan
	Penulis	Berlian Nur Awaniz (2011)
	Analisis Data	Regresi linear berganda
	Hasil	Variabel dana alokasi umum (X1) berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Y) hasil tersebut mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum, maka belanja daerah akan semakin meningkat. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Variabel pendapatan asli daerah (X2) berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Y). Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi pendapatan asli daerah, belanja daerah akan semakin meningkat.
	Perbedaan	Obyek penelitian yang digunakan oleh Berlian yakni pemerintah Kota di Eks Karesidenan Pekalongan sedangkan pada penelitian ini di lingkup Jawa Tengah.
8	Judul	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia.
	Penulis	Fransisca Roosiana Kurniawati (2010)
	Analisis Data	Model regresi sederhana dan berganda
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah.
	Perbedaan	Obyek penelitian yang digunakan oleh Fransisca yakni pemerintah daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya di lingkup Jawa Tengah.
9	Judul	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)
	Penulis	Kesit Bambang Prakosa (2004)
	Analisis Data	Regresi sederhana dan berganda
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD

		berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah baik dengan lag maupun tanpa lag, serta menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect.
	Perbedaan	Obyek penelitian yang digunakan Kesit yakni Provinsi Jawa Tengah dan DIY sedangkan pada penelitian ini hanya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian periode tahun penelitian Kesit yakni tahun 2000-2002 sedangkan pada penelitian ini memakai periode tahun 2016-2018.
10	Judul	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal
	Penulis	Arbie Gugus Wandira
	Analisis Data	Regresi linier berganda
	Hasil	Tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap Belanja Modal, variable DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan variable PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan.
	Perbedaan	Variable dependen pada penelitian Arbie yakni Belanja Modal sedangkan pada penelitian ini adalah Belanja Daerah. Variabel independen pada penelitian Arbie yakni PAD, DAU, DAK, DBH sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada PAD dan DAU. Obyek penelitian Arbie adalah Provinsi se-Indonesia pada tahun 2012 sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu 2016-2018.
11	Judul	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013
	Penulis	Wimpi priambudi
	Analisis Data	Regresi linier sederhana dan berganda
	Hasil	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
	Perbedaan	Variabel dependen yang digunakan Wimpi yakni Belanja Modal sedangkan penelitian ini menggunakan Belanja Daerah. Obyek penelitian Wimpi mencakup Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa pada tahun 2013 sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2016-2018

Sumber: berbagai jurnal penelitian yang diolah, 2019

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Vidi (2007) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah begitu sebaliknya. Masalah muncul ketika transfer dari pusat ini direspon berbeda oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah justru menjadi tergantung pada kucuran dana dari pusat tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh DAU terhadap belanja daerah telah dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Untung,dkk pada tahun 2017, Ferdiansyah (2018), Trisnawati dan Vidya (2015) diperoleh hasil bahwa DAU secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi (Budiarti, 2013).

H₁ : Ada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

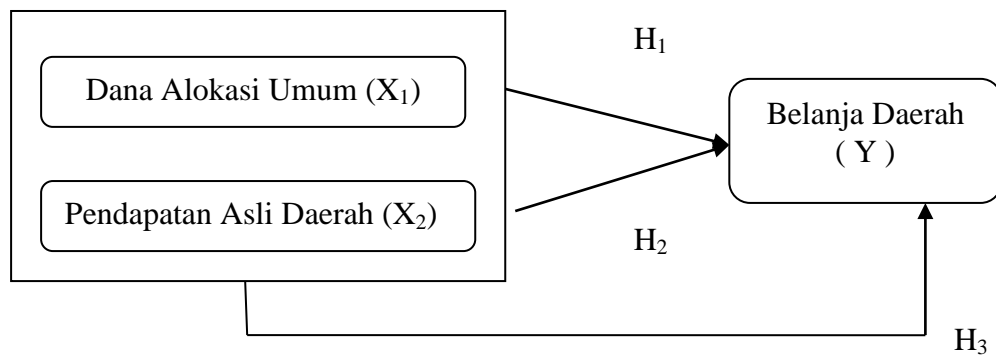
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam meningkatkan kreatifitas untuk menggali potensi yang tidak mungkin dilakukan sebelum otonomi diberlakukan. Semua potensi daerah diupayakan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan PAD yang dapat membantu untuk menutup belanja daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Penelitian lain telah dilakukan untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prakoso pada tahun 2004, Priambudi (2015), Venny, dkk (2019), Irfan, dkk (2018), Muktiawan (2016), Ari (2012) mendapatkan hasil serupa bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.

H₂ : Ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H_3 : Ada pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2016) menjelaskan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik beberapa hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Ada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H_2 : Ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H_3 : Ada pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya yang pengukurannya berdasarkan angka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *hypothesis testing study*, karena untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Berdasarkan tingkat kedudukan variabel, maka penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang mengetahui hubungan atau pengaruh sebab-akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen (Umar, 2005).

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran Kota dan

Kabupaten di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan tahun 2016-2018.

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2014) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan wakil atau sebagian dari populasi yang hendak diselidiki dan memiliki satu sifat sama. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *total sampling*. Menurut arikunto (2006) *total sampling* adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang relatif sedikit yakni 35, maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan tahun 2016-2018.

3.3. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono, (2010:2). Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka peneliti menetapkan variabel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Terikat atau Dependen

Variabel ini sering disebut dengan variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten / Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005).

Total Belanja Daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi total belanja yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran daerah periode 2016-2018. Total belanja daerah tersebut meliputi semua komponen belanja, yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Belanja publik meliputi belanja administrasi umum, biaya operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Variabel Bebas atau Independen

Variabel independen adalah variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi perubahan variabel dependen

(Sugiyono, 2012: 59). Dalam hal ini variabel independennya adalah sebagai berikut :

1) Dana Alokasi Umum (X_1)

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Rumusan alokasi Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan sebagai berikut

$$\text{DAU} = \text{Celah Fisikal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fisikal} = \text{Kebutuhan Fisikal} - \text{Kapasitas Fisikal}$$

Sumber : UU No. 33 tahun 2004.

2) Pendapatan Asli Daerah (X_2)

Variabel Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil

ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Sumber : UU No. 33 tahun 2004

3.4. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah.

3.4.2 Sumber Data

Data diperoleh dari laporan realisasi anggaran Kota dan Kabupaten yang dimulai dari tahun 2016-2018 pada semua Kota/ Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan juga dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Berdasarkan sumber data tersebut maka diperoleh data kuantitatif berupa data laporan realisasi APBD yang memuat data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah.

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5.1 Teknik Pengolahan Data

Hasan (2006) mengemukakan bahwa pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut (Sudjana, 2001). Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

b. *Coding*

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

3.5.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi, data akan menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistika, yaitu dengan penerapan SPSS versi 23.0 (*Statistical Product and Services Solutions*). Setelah itu data-data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Adapun penjelasan mengenai metode analisis data sebagai berikut:

3.5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut (Sugiyono, 2009). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsi suatu data yang dilihat dari mean, median, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menjelaskan mengenai Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada pada penelitian. Dalam penelitian ini statistik deskriptif dilakukan dengan menentukan kategori penilaian setiap nilai rata-rata (mean) perubahan pada variabel penelitian.

3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sebelum dilakukan uji normalitas residual maka dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data ini dapat menggunakan uji analisis parametrik atau nonparametrik. Pengujian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria pengujian $\alpha = 0.05$ sebagai berikut:

- 1) Jika $\alpha \text{ sig} \geq \alpha$ berarti data sampel berdistribusi normal.
- 2) Jika $\alpha \text{ sig} \leq \alpha$ berarti data sampel tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Salah satu model untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas pada penelitian ini yaitu dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut Ghozali (2011):

- 1) Jika tolerance $> 10\%$ dan VIF $< 10\%$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika tolerance $< 10\%$ dan VIF $> 10\%$, maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2011) menerangkan Heteroskedastisitas merupakan penyebaran titik data populasi yang berbeda pada regresi. Situasi heteroskedastisitas ini yang akan menyebabkan penaksiran koefisien regresi menjadi bias. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu variabel mempunyai varian yang sama atau tidak untuk semua nilai variabel bebas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan grafik scatterplot dan uji Glejser. Apabila koefisien

parameter $\beta > 0,05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji ini dilakukan karena data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data time series, dalam data jenis ini sering muncul problem autokorelasi yang dapat saling “mengganggu” antara data (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi $r = 0$

H_a : ada autokorelasi $r \neq 0$

Berdasarkan tes Durbin Watson, pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan pada ketentuan:

Tabel 3.1

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

H_0 (hipotesis nol) Jika	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4dl$
Tidak ada autokorelasi positif / negatif	Terima	$Du < d < 4 - du$

3.5.2.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen. Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, hubungan antara kedua variabel disebut analisis berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Persamaan regresi } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Diketahui:

Y = Belanja Daerah

α = Konstanta

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

e = *error*

3.5.2.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan pengujian secara parsial (uji statistik t), dan secara analisis koefisien Determinasi (R^2). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

a. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)

Uji *Hosmer and Leweshow Goodness of Fit Test* dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai *Chi-Square* dari uji *Hosmer and Leweshow*.

Pengambilan keputusan:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka model dinyatakan tidak fit atau tidak layak untuk menjadi model penelitian.
- 2) Jika probabilitas $\leq 0,05$ maka model dinyatakan fit atau layak untuk menjadi model penelitian.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , maka nilai *Adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. (Ghozali, 2011) jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai R^2 dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan

jika nilai $R^2 = 0$, maka $\text{adjusted } R^2 = (1 - K) / (n - k)$. Jika $k > 1$, maka $\text{adjusted } R^2$ akan bernilai negatif.

c. Pengujian Parsial (Uji t Statistik)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Adapun hipotesis dilakukan sebagai berikut: $H : b_1 \neq 0$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen X terhadap variabel dependen (Y).

d. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh keseluruhan variabel independen (X) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Y). Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini, serta untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Penelitian ini hendak menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	Belanja Daerah (miliar rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)	Dana Alokasi Umum (miliar rupiah)
Mean	2.143	304	977
Std. Deviation	696	225	252
Minimum	881	146	440
Maximum	5.170	1.786	1.525

Sumber: Data primer diolah, 2020

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini selama 3 tahun yaitu periode tahun 2016-2018 sehingga sampel berjumlah 105. Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 dapat diperoleh informasi bahwa nilai dari variabel belanja daerah

menunjukkan nilai terendah (*minimum*) adalah sebesar 881 miliar rupiah dimiliki Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016. Sedangkan nilai belanja daerah tertinggi (*maximum*) adalah sebesar 5.170 miliar rupiah dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018. Berdasarkan nilai rata-rata belanja daerah sebesar 2.143 miliar rupiah dan nilai standar deviasinya sebesar 696 miliar rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel belanja daerah bisa dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih rendah daripada nilai rata-ratanya.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah sebesar 146 miliar rupiah dimiliki Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2016. Sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi (*maximum*) adalah sebesar 1.786 miliar rupiah dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018. Berdasarkan nilai rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 304 miliar rupiah dan nilai standar deviasinya sebesar 225 miliar rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih rendah daripada nilai rata-ratanya.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah sebesar 440 miliar rupiah dimiliki Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2018. Sedangkan nilai Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi (*maximum*) adalah sebesar 1.525 miliar rupiah dimiliki Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2017. Berdasarkan nilai rata-rata variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 977 miliar rupiah dan nilai standar deviasinya sebesar 252 miliar rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa data dari

variabel Dana Alokasi Umum (DAU) bisa dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih rendah daripada nilai rata-ratanya.

4.1.2 Hasil Analisis Data

4.1.2.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik telah dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah model regresi variabel dependen dan independen saling terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian data secara analisis statistik dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov – Smirnov*. Menurut Ghozali (2013), data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil pengujian normalitas pada 105 unit analisis terlihat dalam tabel berikut:

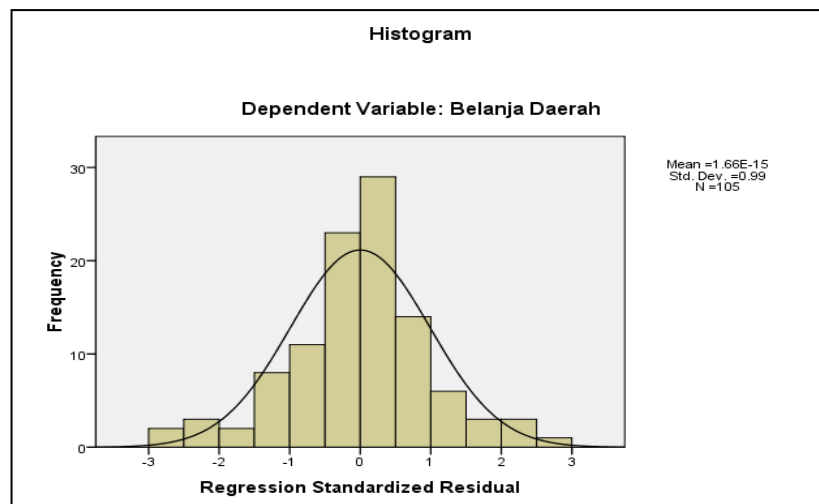
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah
Kolmogorov-Smirnov Z	0,824	1,016	0,875
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,506	0,253	0,428
Taraf Signifikansi	0,05	0,05	0,05
Keterangan	Normal	Normal	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2020

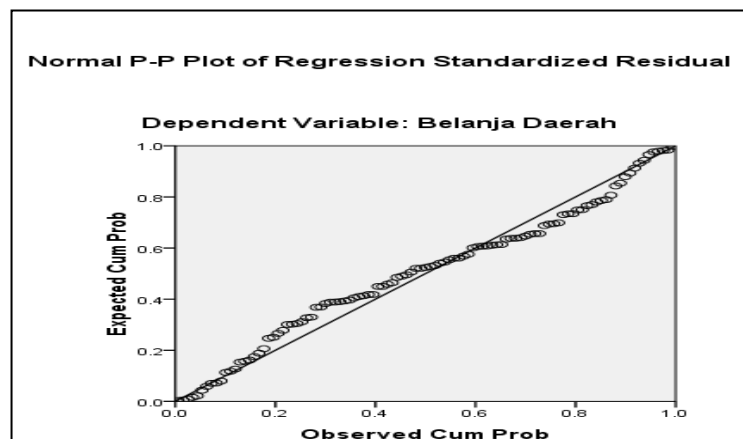
Hasil tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Belanja Daerah (Y) sebesar 0,506, nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar 0,253, dan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) sebesar 0,428 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada masing-masing variabel yang diuji berdistribusi normal.

Uji normalitas selain menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov*, untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang diolah dalam penelitian ini juga dapat ditinjau dari hasil histogram sebagai berikut:



Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data primer diolah, 2020

Histogram di atas dapat diketahui membentuk kurve normal dan sebagian besar bar/batang berada di bawah kurve, maka variabel berdistribusi normal. Selain itu uji normalitas juga dapat ditinjau dari sebaran data yang ada pada gambar P-P Plot sebagai berikut.



Gambar 4.2 P-P Plot Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Data primer diolah, 2020

Gambar 4.2 di atas diperoleh informasi bahwa plot-plot mengikuti garis fit line, maka dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Tidak terjadi multikolonieritas ketika VIF dari asumsi klasik masih diantara 1-10 berikut adalah hasilnya:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Dana Alokasi Umum	0.778	1.285
Pendapatan Asli Daerah	0.778	1.285

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil pengujian di atas diketahui semua variabel independen mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan seluruh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 menunjuk pada model regresi tersebut maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam variabel-variabel independen dalam model regresi ini tidak memiliki multikolinearitas sehingga dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah selama periode pengamatan 2016-2018.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai sebelumnya ataupun nilai periode sesudahnya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam sebuah model regresi, dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Nilai Uji Durbin-Watson

No	Nilai DW	Kesimpulan
1.	$1,65 < DW < 2,35$	Tidak ada autokorelasi.
2.	$1,21 < DW < 1,65$	Tidak dapat disimpulkan.
3.	$2,35 < DW < 2,79$	
4.	$DW < 1,21$	Terjadi autokorelasi.
5.	$DW > 2,79$	

Sumber: Sulaiman, 2004

Dengan menggunakan program SPSS versi 16, diperoleh hasil untuk uji autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Durbin-Watson
.806 ^a	.649	1.781

Sumber: Data primer diolah, 2020

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,781. Nilai tersebut berada diantara 1,65 dan 2,35 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi di penelitian ini.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat digunakan uji statistik yang dinamakan Uji Glejser. Menurut Gujarati (dalam Lestari, 2014), Uji

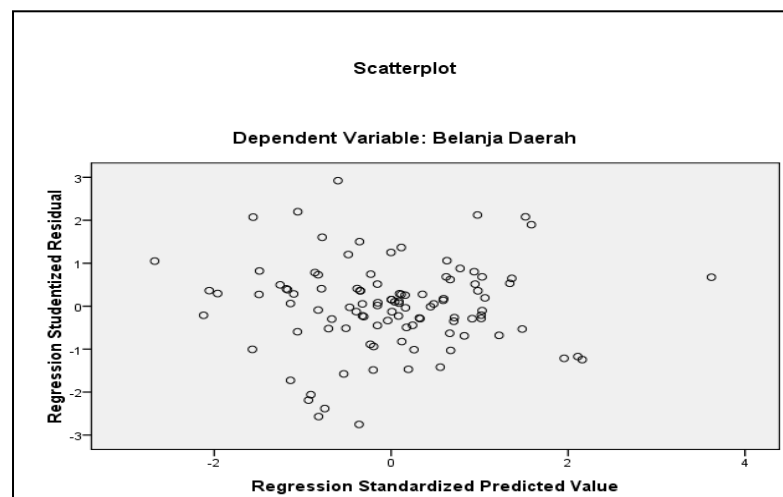
Glejser dilakukan dengan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil Uji Glejser yang didapat adalah:

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficients	
	t_{hitung}	Sig.
Dana Alokasi Umum	0.258	0.797
Pendapatan Asli Daerah	1.022	0.119

Sumber: Data primer diolah, 2020

Output di atas menunjukkan hasil bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada gejala heteroskedastisitas karena $Sig. > 0,05$. Selain menggunakan uji Glejser, untuk mendeteksi adanya kasus heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat diagram plot residual terhadap variabel dependen yang distandarisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.3 Hasil Scatterplot

Sumber: Data primer diolah, 2020

Output *Scatterplot* di atas dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.2.2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi dan dihitung dengan menggunakan program SPSS. Berikut adalah output kedua variabel independen yaitu dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	t _{hitung}	Sig.
(Constant)	-143169892299.352		-2.650	0.009
Dana Alokasi Umum	1.834	0.666	32.164	0.000
Pendapatan Asli Daerah	1.625	0.526	25.412	0.000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 4.7 di atas dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah dengan memperlihatkan nilai koefisien variabel dana alokasi umum (X_1) adalah sebesar 0.666 dan koefisien variabel pendapatan asli daerah (X_2) adalah sebesar 0.526. Berdasarkan tabel di atas, maka model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Belanja Daerah} = -143,169,892,299.352 + 0.666 \text{ DAU} + 0.526 \text{ PAD}$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y).

- a. β_1 (Nilai koefisien regresi X_1) sebesar 0.666 dan bertanda positif yang terdapat pada koefisiensi regresi variabel bebas (dana alokasi umum) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (dana alokasi umum) dengan variabel terikat (belanja daerah) adalah searah. Dimana setiap kenaikan satu satuan variabel dana alokasi umum akan menyebabkan kenaikan belanja daerah sebesar 0.666.
- b. β_1 (Nilai koefisien regresi X_2) sebesar 0.526 dan bertanda positif yang terdapat pada koefisiensi regresi variabel bebas (pendapatan asli daerah) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (pendapatan asli daerah) dengan variabel terikat (belanja daerah) adalah searah. Dimana setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan asli daerah akan menyebabkan kenaikan belanja daerah sebesar 0.526.

4.1.2.3. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent).

a. Hasil Uji F (Ketepatan Model)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk memenuhi semua pengaruh variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 5%. Hasil uji koefisien signifikan simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik F

Df	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
2	1270.886	3.09	0.000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel anova hasil dari pengolahan data dengan program SPSS versi 16 yang telah disajikan pada tabel di atas diperoleh F_{hitung} sebesar 1270.886 dengan signifikansi sebesar 0,000. F_{tabel} pada taraf 5% (0,05), df1 = (jumlah independen = 2) dan df2 ($n - k - 1 = 105 - 2 - 1 = 102$), maka nilai F_{tabel} = 3.09. Hal ini menunjukkan bahwa F_{hitung} > F_{tabel} dan nilai Sig 0,000 < 0,05, maka model regresi dikatakan baik (*fit of goodness*) dan variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian H₃ yang berbunyi “ada pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah” diterima.

b. Hasil Statistik T (*t-test*)

Uji statistik T (*t-test*) bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah) terhadap variabel dependen. Hasil uji analisis regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik T (*t-test*)

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Dana Alokasi Umum	1.834	32.164	1,659	0.000
Pendapatan Asli Daerah	1.625	25.412	1,659	0.000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan nilai signifikansinya. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

1) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 32.164. Besarnya nilai t_{tabel} untuk taraf signifikan 5% db = 103 (db = N – 2 untuk N =105) yaitu 1,659 taraf signifikan 5%, jadi t_{hitung} > t_{tabel} dan nilai Sig 0,000 < 0,05 maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X₁ terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian H₁ yang berbunyi “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah” diterima.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25.412. Besarnya nilai t_{tabel} untuk taraf signifikan 5% db = 103 (db = N - 2 untuk N = 105) yaitu 1,659 taraf signifikan 5%, jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai Sig 0,000 < 0,05 maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian H_2 yang berbunyi “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah” diterima.

c. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis	R	R Square
X_1 , dan X_2 , Terhadap Y	0.981	0.961
X_1 Terhadap Y	0.847	0.717
X_2 Terhadap Y	0.755	0.570

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil tabel 4.10 di atas dapat diketahui nilai R Square. Melalui tabel di atas juga diperoleh nilai R Square atau Koefisien Determinasi

(KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai Koefisien Determinasi (KD) yang diperoleh pada variabel X_1 , dan X_2 terhadap Y adalah 0.961. Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa variabel X_1 , dan X_2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 96,1% dan sisanya 3.9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian nilai Koefisien Determinasi (KD) yang diperoleh pada variabel X_1 terhadap Y adalah 0.717. Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah sebesar 71.7% dan sisanya 28.3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan nilai Koefisien Determinasi (KD) yang diperoleh pada variabel X_2 terhadap Y adalah 0.570. Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 57% dan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel yang dapat memprediksi belanja pemerintah daerah. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga pada pembahasan berikut dipaparkan berdasarkan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan di bab pendahuluan.

4.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah salah satunya dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk

mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN.

Hasil penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 32.164. Besarnya nilai t_{tabel} untuk taraf signifikan 5% db = 103 (db = N - 2 untuk N = 105) yaitu 1,659 taraf signifikan 5%, jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Kemudian nilai Koefisien Determinasi (KD) yang diperoleh pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja pemerintah daerah adalah 0.717. Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah sebesar 71,7%.

Penelitian Holtz-Eakin *et.al.* Sebagaimana yang dikutip oleh Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah. Meskipun otonomi daerah telah diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kab/Kota yang masih menggantungkan sumber pendanaan pemerintahan daerahnya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat).

Semakin besar DAU maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah.

Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah begitu sebaliknya. Masalah muncul ketika transfer dari pusat ini direspon berbeda oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah justru menjadi tergantung pada kucuran dana dari pusat tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Untung,dkk (2017), Ferdiansyah (2018), Trisnawati dan Vidya (2015) diperoleh hasil bahwa DAU secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi (Budiarti, 2013).

4.2.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut jenis pendapatan daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Yuwono 2008:94). Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja daerah (Solikin, 2010).

Penelitian Rasidah (2011) menyatakan bahwa PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar di banding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Hasil penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25.412. Besarnya nilai t_{tabel} untuk taraf signifikan 5% db = 103 (db = N - 2 untuk N = 105) yaitu 1,659 taraf signifikan 5%, jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja

pemerintah daerah. Berdasarkan nilai Koefisien Determinasi (KD) yang diperoleh pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah adalah 0.570. Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah sebesar 57%.

Berpengaruhnya PAD terhadap belanja daerah dikarenakan jika dilihat secara keseluruhan PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah besar kontribusinya terhadap belanja daerah. Sehingga pertumbuhan PAD mempengaruhi belanja daerah. Hal ini berarti rata-rata tingkat belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh tingkat PAD, yaitu sesuai dengan tujuan PAD untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja daerah pun akan semakin tinggi.

Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja daerah maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan

mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan belanja daerah terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sugiarti dan Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakoso pada tahun 2004, Priambudi (2015), Venny, dkk (2019), Irfan, dkk (2018), Muktiawan (2016), Ari (2012) mendapatkan hasil serupa bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Yuwono 2008: 96). Menurut UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (16) belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Obyek pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan tahun 2016-2018.

Hasil penelitian ini diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 1270.886 dengan signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan F_{tabel} pada taraf 5% (0,05), maka diperoleh nilai $F_{tabel} = 3.09$. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai Sig 0,000 < 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai Koefisien Determinasi (KD) yang diperoleh pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 0.961. Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap variabel belanja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,1% dan sisanya 3,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam penelitian ini.

DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menggambarkan bahwa DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD, berarti semakin besar daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini menggambarkan bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2010) mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2005-2007 studi kasus pada kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan sampel 35 daerah di provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitiannya diperoleh

hasil bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah di provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2010) mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia dengan jumlah sampel 228 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh hasil, bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Venny,dkk (2019), Joko,dkk (2017), Muktiawan (2016), Berlian (2011), dan Fransisca (2010) diperoleh hasil bahwa DAU dan PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya menjadi dasar penarikan kesimpulan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah, maka diharapkan dapat memberikan transparansi laporan keuangan dalam penggunaan/ pengalokasian DAU. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pihak-pihak berwenang lainnya dapat melakukan kontrol atas penggunaan DAU

tersebut agar lebih efektif dan efisien sehingga percepatan pembangunan dan pendapatan yang mendorong kemandirian daerah dapat lebih optimal.

2. Rendahnya pengaruh PAD terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan DAU diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk lebih giat menggali informasi mengenai potensi daerah dalam mengoptimalkan PAD-nya dengan berbagai cara, misalkan mengoptimalkan pajak dan retribusi dari berbagai bidang, pengembangan pariwisata, peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
3. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pengalokasian sumber-sumber penerimaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriana. (2012). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007”. *JAUJ* Vol. 10 No. 1. Hal 51-60.
- Awaniz, Berlian Nur. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan. Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018 (Buku 1 Sumatera-Jawa)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- _____. (2019b). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018 (Buku 2 Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2015*. Semarang: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- _____. (2017). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2016*. Semarang: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dewi, Siska Puspita., Suyanto. (2015). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 1. Hal 9-21.
- Ferdiansyah, Irfan; Dwi Risma Deviyanti; Salmah Pattisahusiwa. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14 (1) 2018, 44-52
- Gani, William., Kristanto, Septian Bayu. (2013). “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. *Jurnal InFestasi* Vol. 9 No. 2. Hal 115-122.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ginting, Ari Mulianta. 2012. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa. *Jurnal Kajian*, Vol.17, No.3. Hlm: 357-382.
- Hariadi, Pramono., Restianto, Yanuar E., dan Bawono, Icuk Rangga. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein Umar. (2005), *Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Kusumadewi, Diah Ayu., dan Rahman Arief. (2007). "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia". *JAAI Volume 11 No.1*. Hal 67-80.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Masdjodjo, N. Gregorius., dan Sukartono. (2009). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2009". *TEMA Vol. 6 Edisi 1 Hal 32-50*.
- Mawarni., Darwanis., dan Abdullah, Syukriy. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh)". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 No. 2*. Hal 80-90.
- Muktiawan, Fathul Fajar. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas wilayah Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota di Pulau Jawa). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Munir, Misbahul., dan Mahdar, Nera Marinda. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Kalbisocio Volume 3 No. 2*. Hal 30-37.

- Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). "Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No.1. Hal 89-95.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah, Studi di wilayah Provinsi Jateng dan DIY". *JAAI Volume 8 No 2*. Hal 101-118.
- Priambudi, Wimpi. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013". *Jurnal Nominal Volume VI No. 1*. Hal 136-147.
- Redaksi Fokus Media. (2011). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- _____. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saptaningsih, Sumarmi. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmerupa UPY*, Vol 4,
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung
- Trisnawati dan Vidya. 2015. Pengaruh DAU, DAK, dan PAD Terhadap Belanja Daerah di DIY dan Jawa Tengah. *AKMENIKA*. Vol 12, No 1

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Untung, Joko; Tri Widyastuti dan Suyanto. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Priode Tahun 2010-2014.* Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika Volume 1 Nomor 2 Mei 2017 ISSN 23376686.

Wandira, Arbie Gugus. (2013). “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Accounting Analysis Journal* Vol. 2 No. 1. Hal 44-51.

Wulansari, Dessy Tri. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat Tahun 2012 – 2013.* Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Tabulasi Data

NO	DAERAH	TAHUN		Belanja Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Dana Alokasi Umum (Rupiah)
1	KAB. BANJARNEGARA	2018	1	2.077.621.418.000	198.878.252.500	959.486.489.000
		2017	2	2.111.246.514.000	171.919.606.000	1.029.693.497.000
		2016	3	1.967.224.600.400	152.643.255.000	976.642.965.000
2	KAB. BANYUMAS	2018	4	3.472.253.363.785	586.340.721.110	1.373.971.809.000
		2017	5	3.423.241.736.613	520.859.490.133	1.525.152.407.884
		2016	6	3.166.133.434.170	450.492.114.220	1.398.539.653.000
3	KAB. BATANG	2018	7	1.705.149.533.749	232.903.746.702	781.383.387.000
		2017	8	1.672.702.451.948	193.814.773.457	790.848.003.000
		2016	9	1.676.569.617.673	159.105.340.440	790.848.003.000
4	KAB. BLORA	2018	10	2.056.656.801.692	191.752.934.000	926.754.302.000
		2017	11	1.947.278.632.000	190.393.348.000	943.325.498.000
		2016	12	1.958.884.711.000	208.168.641.000	943.325.498.000
5	KAB. BOYOLALI	2018	13	2.242.814.340.000	290.489.406.000	1.014.602.019.000
		2017	14	2.142.157.436.000	260.593.837.000	1.032.744.010.000
		2016	15	2.150.966.568.000	250.959.622.000	1.032.744.000.000
6	KAB. BREBES	2018	16	2.833.645.748.000	356.089.882.000	1.322.465.038.000
		2017	17	2.874.247.890.000	373.410.356.000	1.339.381.605.000
		2016	18	2.962.040.019.000	311.818.549.000	1.339.381.605.000
7	KAB. CILACAP	2018	19	3.084.579.637.400	420.596.424.000	1.362.443.518.000
		2017	20	2.980.319.089.600	359.683.430.575	1.510.054.931.000
		2016	21	2.962.482.921.350	328.506.883.375	1.384.695.514.000

8	KAB. DEMAK	2018	22	2.014.063.460.400	275.726.614.400	894.376.873.000
		2017	23	1.935.220.348.000	256.033.200.000	958.000.609.000
		2016	24	1.953.653.242.000	235.865.652.000	908.643.744.000
9	KAB. GROBOGAN	2018	25	2.383.805.230.083	303.906.238.991	1.094.460.434.000
		2017	26	2.450.522.226.143	295.990.910.000	1.110.337.027.000
		2016	27	2.249.898.788.316	229.073.145.236	1.110.337.027.000
10	KAB. JEPARA	2018	28	2.358.409.053.000	325.195.315.000	984.937.249.000
		2017	29	2.230.152.024.000	276.034.167.000	1.000.373.359.000
		2016	30	2.113.666.475.000	219.091.687.000	1.000.373.359.000
11	KAB. KARANGANYAR	2018	31	2.150.630.160.000	317.469.444.000	978.664.650.000
		2017	32	2.042.548.970.000	280.521.424.000	996.164.049.000
		2016	33	2.052.584.508.000	216.509.544.000	996.164.049.000
12	KAB. KEBUMEN	2018	34	2.812.902.414.000	347.309.619.000	1.234.003.169.000
		2017	35	2.712.153.687.000	293.481.316.000	1.256.068.249.000
		2016	36	2.604.207.342.000	216.524.649.000	1.256.068.249.000
13	KAB. KENDAL	2018	37	2.184.770.769.700	333.509.817.700	956.765.777.000
		2017	38	2.090.988.838.483	291.101.687.916	1.025.802.650.254
		2016	39	1.989.413.403.646	203.810.166.929	972.952.576.000
14	KAB. KLATEN	2018	40	2.656.503.142.500	354.566.542.500	1.237.967.327.000
		2017	41	2.590.956.004.000	208.930.740.000	1.305.212.808.000
		2016	42	1.989.413.403.646	194.443.122.000	1.237.967.327.000
15	KAB. KUDUS	2018	43	1.803.484.250.000	319.049.890.000	807.711.173.000
		2017	44	1.947.737.161.000	288.227.761.000	822.153.771.000
		2016	45	1.922.732.239.000	274.923.909.000	822.153.771.000

16	KAB. MAGELANG	2018	46	2.662.575.016.000	354.246.627.000	1.060.540.612.000
		2017	47	2.417.344.682.330	280.660.101.155	1.078.981.977.000
		2016	48	2.340.396.942.410	240.539.782.600	1.078.981.977.000
17	KAB. PATI	2018	49	2.647.132.050.000	320.819.026.000	1.189.796.870.000
		2017	50	2.540.490.284.000	291.412.554.000	1.207.508.997.000
		2016	51	2.554.346.771.000	267.966.240.000	1.207.508.997.000
18	KAB. PEKALONGAN	2018	52	2.230.242.642.800	360.506.566.639	915.154.037.000
		2017	53	1.990.862.108.607	292.072.197.384	926.571.243.000
		2016	54	1.882.800.850.086	270.908.898.045	926.571.243.000
19	KAB. PEMALANG	2018	55	2.262.937.665.000	255.453.703.000	1.176.872.960.000
		2017	56	2.141.783.328.000	249.273.252.000	1.284.676.435.000
		2016	57	1.832.248.065.000	212.482.621.000	1.058.982.530.000
20	KAB. PURBALINGGA	2018	58	1.992.797.269.000	256.528.113.000	881.574.483.000
		2017	59	2.053.677.282.000	247.176.826.000	946.080.559.000
		2016	60	1.823.605.189.000	199.788.684.000	897.337.823.000
21	KAB. PURWOREJO	2018	61	1.875.058.304.015	267.294.598.415	924.251.795.000
		2017	62	2.170.461.184.395	237.664.091.269	1.008.914.761.000
		2016	63	2.034.299.301.041	201.408.936.102	940.778.244.000
22	KAB. REMBANG	2018	64	1.861.907.718.384	280.604.454.655	815.321.417.000
		2017	65	1.738.067.268.368	215.135.074.655	882.034.026.211
		2016	66	1.937.216.565.110	180.807.678.500	785.380.985.000
23	KAB. SEMARANG	2018	67	2.132.848.624.000	362.012.449.000	952.362.147.000
		2017	68	1.999.937.106.000	326.684.586.000	968.848.031.000
		2016	69	2.190.956.841.000	268.963.621.000	968.848.031.000

24	KAB. SRAGEN	2018	70	2.170.257.833.699	293.218.865.000	1.049.016.918.000
		2017	71	2.083.180.920.000	258.198.936.000	1.067.774.278.000
		2016	72	2.190.956.841.000	219.567.546.000	1.067.774.278.000
25	KAB. SUKOHARJO	2018	73	2.126.525.216.000	300.348.518.000	941.984.410.000
		2017	74	2.083.547.482.000	292.925.947.000	1.028.164.573.000
		2016	75	1.912.871.494.000	264.729.757.000	922.624.169.000
26	KAB. TEGAL	2018	76	2.789.114.512.000	399.909.505.000	1.144.494.182.000
		2017	77	2.386.641.000.000	322.128.369.000	1.225.226.650.000
		2016	78	2.628.432.854.000	275.013.096.000	1.162.102.111.000
27	KAB. TEMANGGUNG	2018	79	1.723.357.367.620	241.191.966.721	793.801.136.000
		2017	80	1.888.027.231.040	230.047.289.410	807.995.010.000
		2016	81	1.688.885.738.711	203.456.549.000	807.995.010.000
28	KAB. WONOGIRI	2018	82	2.279.376.071.842	227.465.150.842	1.125.312.680.000
		2017	83	2.246.358.192.180	191.203.292.217	1.145.434.277.000
		2016	84	2.249.505.007.989	184.460.558.389	1.145.434.277.000
29	KAB. WONOSOBO	2018	85	1.891.614.169.500	205.810.310.500	827.791.657.000
		2017	86	1.802.450.915.201	182.959.003.201	841.407.175.000
		2016	87	1.801.693.754.017	164.649.559.140	841.407.175.000
30	KOTA MAGELANG	2018	88	969.216.881.000	217.823.794.000	440.041.244.000
		2017	89	907.336.421.000	206.161.682.000	447.909.575.000
		2016	90	881.415.644.000	178.121.571.000	447.909.575.000
31	KOTA PEKALONGAN	2018	91	959.757.125.000	190.122.968.000	449.055.738.000
		2017	92	907.336.421.000	182.249.034.000	457.085.256.000
		2016	93	922.612.237.000	160.542.382.000	457.085.256.000

32	KOTA SALATIGA	2018	94	923.362.432.000	212.302.596.000	448.067.710.000
		2017	95	882.448.819.000	160.545.713.000	480.853.469.000
		2016	96	934.038.576.000	146.651.969.000	456.079.561.000
33	KOTA SEMARANG	2018	97	5.170.158.970.218	1.786.944.057.000	1.190.422.387.000
		2017	98	4.550.157.704.000	1.513.277.689.000	1.376.255.966.000
		2016	99	4.187.918.414.000	1.232.373.211.000	1.211.708.204.000
34	KOTA SURAKARTA	2018	100	1.905.769.955.034	453.507.548.000	826.753.038.000
		2017	101	1.814.341.049.000	430.216.738.000	841.536.122.000
		2016	102	1.795.120.219.000	372.579.581.000	841.536.122.000
35	KOTA TEGAL	2018	103	1.089.919.641.000	298.131.841.000	482.150.715.000
		2017	104	1.150.919.453.000	281.841.490.000	490.772.001.000
		2016	105	1.133.323.560.000	258.668.643.000	490.772.001.000

Lampiran 2

Hasil Distribusi Statistik

Statistics		Variables		
		BD	PAD	DAU
N	Valid	105	105	105
	Missing	0	0	0
Mean		2.1433E12	3.0425E11	9.7725E11
Std. Deviation		6.96384E11	2.25488E11	2.52953E11
Minimum		8.81E11	1.47E11	4.40E11
Maximum		5.17E12	1.79E12	1.53E12

Lampiran 3

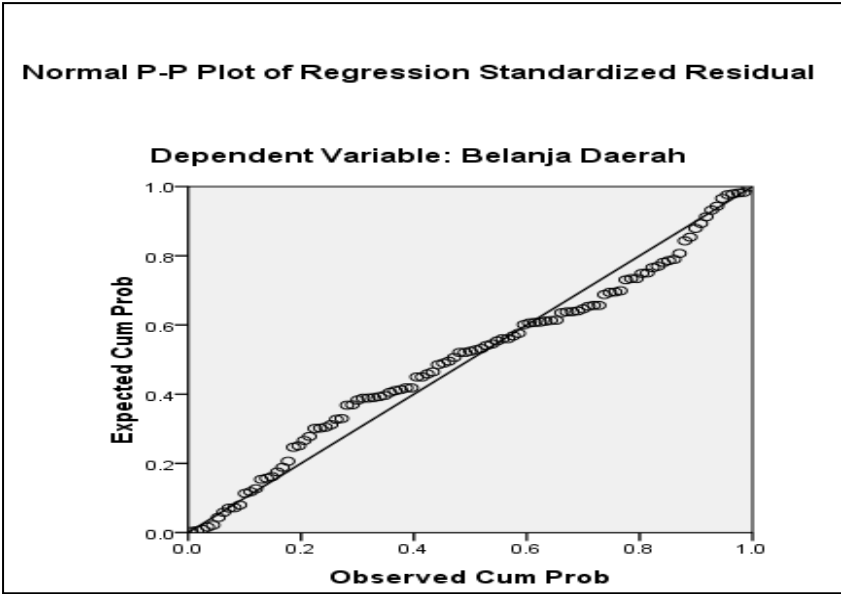
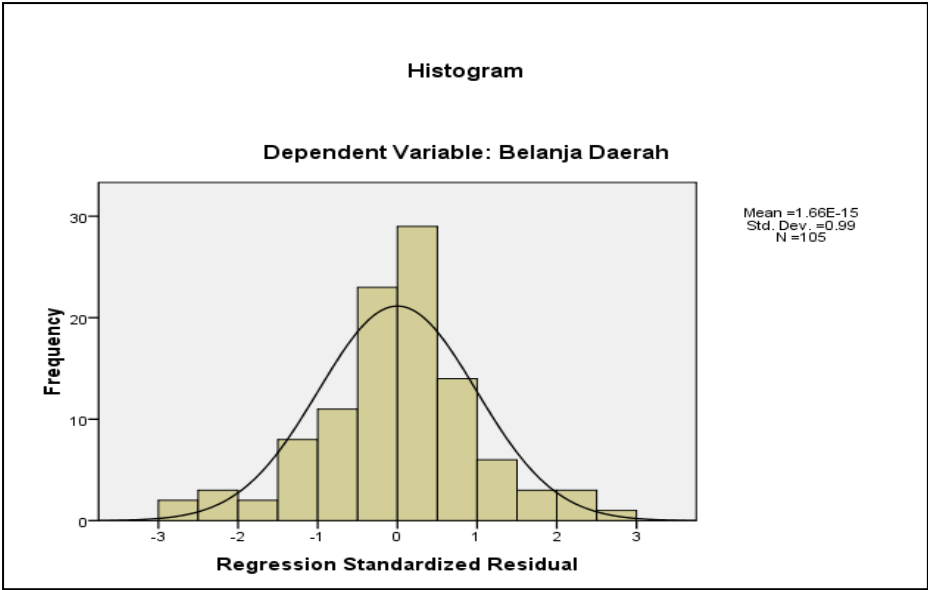
Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah
N		105	105	105
Normal Parameters ^a	Mean	214333882651.28	977254829660.47	304252138876.41
	Std. Deviation	696383695647.831	252952646731.326	225487520148.701
Most Extreme Differences	Absolute	.080	.099	.085
	Positive	.052	.099	.051
	Negative	-.080	-.077	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.824	1.016	.875
Asymp. Sig. (2-tailed)		.506	.253	.428

a. Test distribution is Normal.



2. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.432E+11	5.403E+10			
	Dana Alokasi Umum	1.834	.057	.666	.778	1.285
	Pendapatan Asli Daerah	1.625	.064	.526	.778	1.285

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.649	.961	1.381E+11	1.781

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Kriteria Nilai Uji Durbin-Watson

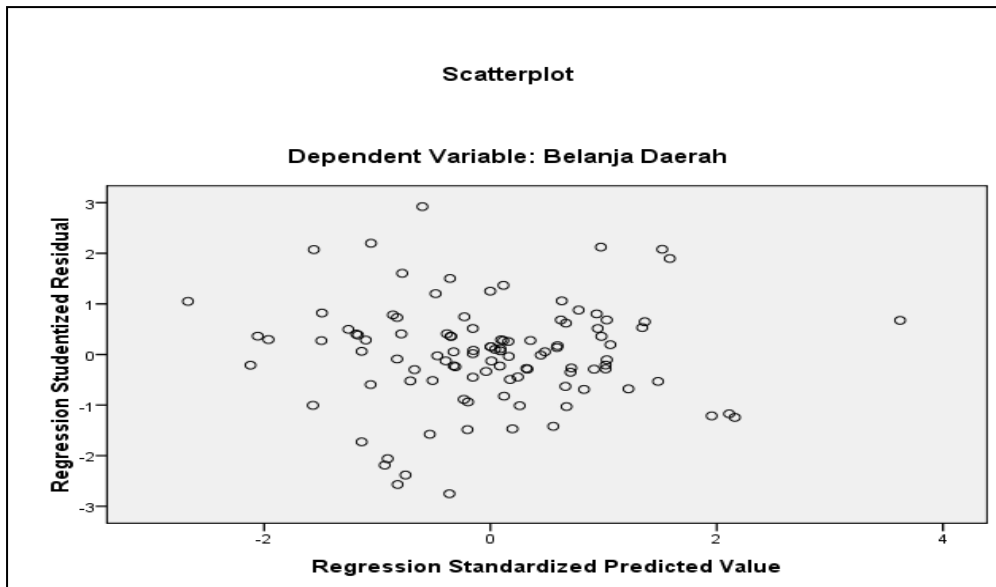
No	Nilai DW	Kesimpulan
1.	$1,65 < DW < 2,35$	Tidak ada autokorelasi.
2.	$1,21 < DW < 1,65$	Tidak dapat disimpulkan.
3.	$2,35 < DW < 2,79$	
4.	$DW < 1,21$	Terjadi autokorelasi.
5.	$DW > 2,79$	

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.113E+10	3.423E+10		1.494	.138
	Dana Alokasi Umum	.011	.042	.029	.258	.797
	Pendapatan Asli Daerah	.001	.052	.268	1.022	.119

a. Dependent Variable: Abs_RES



Lampiran 4

Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.432E+11	5.403E+10		-2.650	.009
	Dana Alokasi Umum	1.834	.057	.666	32.164	.000
	Pendapatan Asli Daerah	1.625	.064	.526	25.412	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 5

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

X_1 , dan X_2 , Terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.961	.961	1.381E+11

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

X_1 Terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.717	.714	3.722E+11

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

X2 Terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755 ^a	.570	.566	4.588E+11

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

2. Uji Statistik F (*F-test*)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.849E+25	2	2.424E+25	1270.886	.000^a
	Residual	1.946E+24	102	1.908E+22		
	Total	5.043E+25	104			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

3. Uji Statistik T (*t-test*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.432E+11	5.403E+10		-2.650	.009
	Dana Alokasi Umum	1.834	.057	.666	32.164	.000
	Pendapatan Asli Daerah	1.625	.064	.526	25.412	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah